

LAPORAN KEGIATAN

STUDI BANDING

JL. TANTULAR BARAT NO. 1 TELP.0361 222952, FAX 0361 225761  
Email : [ptdpsbali@yahoo.com](mailto:ptdpsbali@yahoo.com) Website : [www.pt.denpasar.go.id](http://www.pt.denpasar.go.id)

PENGADILAN TINGGI DENPASAR DAN PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH - BALI

20233

PADA PENGADILAN NEGERI WATES

TANGGAL 13 - 14 JULI 2023

PENGADILAN NEGERI NEGARA

JL. MAYOR SUGIANYAR NO.1, NEGARA, TELP. (0365) 41204 FAX (0365) 41204 Email : [pn\_negara@yahoo.com](mailto:pn_negara@yahoo.com) Website : [www.pn-negara.go.id](http://www.pn-negara.go.id)

**LAPORAN KEGIATAN STUDI BANDING**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

**ZONA INTEGRITAS**

**PENGADILAN NEGERI WATES**



OLEH :

PENGADILAN NEGERI NEGARA

PENGADILAN NEGERI NEGARA

MAHKAMAH AGUNG

2023

**K A T A P E N G A N T A R**

Ucapan syukur atau angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa atas segala waranugraha / karunianya sehingga kegiatan Studi Banding di Pengadilan Negeri Wates pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jogjakarta oleh Aparatur Pengadilan Tinggi Denpasar dan segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Se-Bali pada tanggal 13 Juli 2023 s.d 14 Juli 2023 dapat terlaksana dengan baik sehingga Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Sebagaimana diketahui Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara efektif dan efisien, sehingga diharapkan mampu melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, di antaranya adalah adanya Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan aparatur tersebut telah dilakukan langkah - langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) dengan penetapan satuan kerja ( satker ) untuk diusulkan WBK / WBBM.

Penetapan satuan kerja ( satker ) berpredikat WBK / WBBM tersebut dimaksudkan sebagai area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker-satker di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang terdiri atas 6 area, meliputi : manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayana publik yang prima.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung mensukseskan program pembangunan Zona Integritas pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara menyeluruh, maka Pengadilan Tinggi Denpasar beserta segenap peradilan dibawahnya senantiasa berupaya meningkatkan pemahaman dan implementasinya secara konsisten. Kegiatan studi banding dilakukan sebagai bentuk benchmarking terhadap satker – satker dibawah Mahkamah Agung yang telah berhasil dalam pembangunan zona integritas sehingga meraih predikat WBK / WBBM.

Sehubungan kegiatan studi banding ke Pengadilan Negeri Wates telah berjalan dengan lancar, maka tidak lupa untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jogjakarta dan Ketua Pengadilan Negeri Wates yang telah menerima kehadiran dan memfasilitasi selama kegiatan berlangsung dengan baik. Selain itu, diucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Apabila nantinya terdapat kesalahan dalam penulisan laporan ini, diharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya segenap aparatur Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Se-Bali.

Denpasar, 18 Juli 2023

Ketua PN Negara

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

|  |  |
| --- | --- |
| **DAFTAR ISI** |  |
|  |  |
| **BAB I PENDAHULUAN .…………………………………………………….** | **1** |
| 1. **DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN …………….……………** 2. **LATAR BELAKANG ………………………………………….……** 3. **RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN .………….…** 4. **MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...…** 5. **METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN ………………....** 6. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN ………….......** 7. **GAMBARAN UMUM TEMPAT STUDI BANDING ……….……..** | **1**  **1**  **2**  **2**  **2**  **3**  **3** |
| **BAB II LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN …………………..………** | **4** |
| 1. **PELAKSANAAN KOMPONEN PENGUNGKIT ………………..** |  |
| **A.1. MANAJEMEN PERUBAHAN ……………………………….** |  |
| **A.2. PENATAAN TATA LAKSANA ….………………………….** |  |
| **A.3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ….…………….** |  |
| **A.4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA …..………….** |  |
| **A.5. PENGUATAN PENGAWASAN …………………………….** |  |
| **A.6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ……** |  |
| 1. **CAPAIAN KOMPONEN HASIL ………………………………….** |  |
| **BAB III PENUTUP …………………………………………………………..…..** | **8** |
| **KESIMPULAN …………..………………………………………….….**  **REKOMENDASI ………..………………………………………….….** | **8**  **8** |
|  |  |
| **LAMPIRAN - LAMPIRAN……………….……………………………………..** | **9** |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir kali dalam Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tentang Peradilan Umum.
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 / PMK.05 / 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap ;
6. Surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : W.24 - U / 1395 / KP.01.1 / 7 / 2023 tanggal 11 Juli 2023
7. **LATAR BELAKANG**

Reformasi Birokrasi sebagai *tools* percepatan prioritas kerja Presiden Republik Indonesia dan Pembangunan Nasional yang memiliki visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. Prioritas Kerja yang dimaksud adalah Pembangunan SDM, Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, undang investasi untuk seluas - luasnya membuka lapangan pekerjaan, Reformasi Birokrasi dan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Zona Integritas sendiri, merupakan miniatur dari Pembangunan Reformasi Birokrasi di unit kerja untuk mewujudkan unit pelayanan yang prima, berkinerja tinggi dan berintegritas.

Mendukung hal tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai pengadilan Tingkat banding di bawah Mahkamah Agung RI yang turut serta membangun Zona Integritas dan telah meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ), berkomitmen penuh untuk membangun zona integritas di wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar sehingga dipandang perlu untuk melakukan *benchmarking* atau studi banding untuk memperoleh informasi dan referensi terkait Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja yang telah meraih predikat WBK maupun WBBM.

1. **RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN**
2. Pelaksanaan Komponen Pengungkit pada Zona Integritas;
3. Capaian Komponen Hasil pada Zona Integritas.
4. **MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Menambah wawasan dan pengetahuan terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM ).

1. **METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN**
2. Wawancara dan konfirmasi;
3. Peninjauan Lapangan.
4. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sesuai dengan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : W.24 - U / 1395 / KP.01.1 / 7 / 2023 tanggal 11 Juli 2023, bahwa jangka waktu pelaksanaan studi banding selama 3 ( tiga ) hari dimulai dari tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 pada Pengadilan Negeri Wates.

1. **GAMBARAN UMUM TEMPAT STUDI BANDING**
2. **Alasan Pemilihan Tempat**

Pengadilan Negeri Wates telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi ( WBK ) pada tahun 2019, dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) pada tahun 2020. Sebagai salah satu peradilan umum tingkat pertama yang mampu meraih predikat tersebut selama kurun waktu 2 ( dua ) tahun berturut – turut. Selain itu, pada tahun 2022 telah meraih penghargaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ( SMAP ) dengan predikat Baik oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Hal ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan dan patut dijadikan contoh dalam komitmen membangun integritas dan pelayanan prima sebagaimana sasaran reformasi birokrasi yang dituangkan dalam program pembangunan Zona Integritas.

Sehingga dengan memperhatikan uraian capaian kinerja tersebut maka Pengadilan Negeri Wates layak dijadikan sebagai tempat untuk melakukan *benchmarking* / Studi Banding.

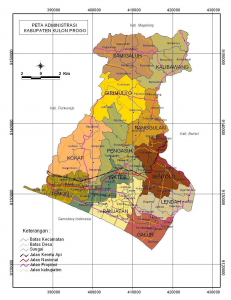
1. **Informasi Umum Pengadilan Negeri Wates**
2. **Sejarah Pengadilan**

Kabupaten Kulon Progo yang ada sekarang ini pada awalnya merupakan 2 daerah kekuasaan yaitu wilayah Utara adalah Kesultanan dengan nama Kabupaten Kulon Progo dan wilayah Selatan adalah Kekuasaan Paku Alaman dengan nama Kabupaten Adikarta. Sesudah Proklamasi kemerdekaan RI, pada tanggal 5 September 1945  Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat bahwa Kesultanan dan Paku Alaman adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia  yang bersifat kerajaan. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang- undang Nomor 15 tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII  tidak berkenan adanya 2 daerah istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta maka diadakan pembicaraan mengenai penggabungan Kabupaten Kulon Progo ( Kesultanan ) dengan Kabupaten Adikarta ( Paku Alaman ) dan disepakati dengan nama Kabupaten Kulon Progo dengan ibukotanya Wates. Atas kesepakatan tersebut, pada tanggal 15 Oktober 1951 pemerintah mengeluarkan Undang- undang nomor 18 tahun 1950 tentang penggabungan Kabupaten Kulun Progo ( Kesultanan ) dengan Kabupaten Adikarta ( Paku Alaman ) menjadi satu kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri Wates adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 3B.54349 tanggal 12 Agustus 1965, dibentuk Pengadilan Negeri Wates dengan daerah hukumnya wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pada waktu itu yang diberi tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan Pengadilan Negeri Wates adalah Bapak Muhammad Boeang, S yang kemudian setelah Pengadilan berdiri beliau diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wates yang pertama. Pada waktu  itu belum ada gedung dan sarananya. Dalam melaksanakan kegiatan peradilan baik sidang perkara perdata maupun pidana menggunakan rumah seorang penduduk dan menyewa gedung Pemerintah Daerah. Baru pada 1973 dilakukan  pembangunan gedung Pengadilan Negeri Wates yang terletak di Jalan Sugiman 19 Wates dengan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departeman Kehakiman RI pada tanggal 30 agustus 1973. Kemudian sesuai perkembangan, Pengadilan Negeri Wates telah  mengalami rehab dan penambahan lokal. Pengadilan Negeri Wates dengan areal tanah seluas 2182 m2 serta luas bangunan 1169 m2 dan berlantai dua, memiliki 3 ( tiga ) buah ruang sidang yang terdiri dari 2 buah ruangan sidang biasa dan satu buah ruang Sidang Utama yang dipergunakan untuk sidang dan pertemuan.

Mulai tanggal 23 Januari 2017 Pengadilan Negeri Wates resmi menempati gedung baru yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 16 Wates, Kulon Progo. Pembangunan gedung yang memiliki luas tanah 2.850 m2 ini berlangsung 3 tahap, tahap I adalah struktur kolom dan pondasi pada tahun 2013, tahap II pada tahun 2015 dan finishing pada tahap III tahun 2016 dengan luas bangunan 2.016 m2.

1. **Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates** :

Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Persentase (%) |
| 1 | Temon | 3,629.890 | 6.19 |
| 2 | Wates | 3,200.239 | 5.45 |
| 3 | Panjatan | 4,459.230 | 7.60 |
| 4 | Galur | 3,291.232 | 5.61 |
| 5 | Lendah | 3,559.192 | 6.07 |
| 6 | Sentolo | 5,265.340 | 8.98 |
| 7 | Pengasih | 6,166.468 | 10.51 |
| 8 | Kokap | 7,379.950 | 12.58 |
| 9 | Girimulyo | 5,490.424 | 9.36 |
| 10 | Nanggulan | 3,960.670 | 6.75 |
| 11 | Kalibawang | 5,296.368 | 9.03 |
| 12 | Samigaluh | 6,929.308 | 11.81 |
|  |  | **58,627.512** | **100** |

1. **Kedudukan kantor**

Pengadilan Negeri Wates

Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta

Telpon (0274)-773068, Faxs. (0274)-773068 Kode Pos 55611

e-mail : [info@pn-wates.go.id](mailto:info@pn-wates.go.id)



Gambar 1

Kantor Pengadilan Negeri Wates

1. **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wates digambarkan sebagai berikut :



1. **Data Perkara Tahun 2022**
   1. Perkara Perdata Tingkat Pertama ( klasifikasi perkara )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengadilan / Perkara** | **Sisa 2021** | **Masuk 2022** | **Total Beban 2022** | **Cabut 2022** | **Putus 2022** | **Sisa Perkara 2022** |
| **1** | **Perdata Gugatan** | **-** | **30** | **30** | **2** | **21** | **7** |
| **2** | **Perdata Permohonan** | **19** | **397** | **416** | **17** | **394** | **8** |
| **3** | **Gugatan Sederhana** | **-** | **23** | **23** | **7** | **12** | **4** |
| **4** | **Perlawanan/Derden Verzet** | - | - | - | - | - | - |
| **5** | **PHI** | - | - | - | - | - | - |
| **6** | **Permohonan Konsinyasi** | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **Eksekusi** | 7 | 8 | - | 6 | 4 | 5 |
| **Jumlah** | | **26** | **458** | **469** | **32** | **431** | **24** |

* 1. Perkara Pidana Tingkat Pertama

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengadilan / Perkara** | **Sisa 2021** | **Masuk 2022** | **Total Beban 2022** | **Cabut 2022** | **Putus 2022** | **Sisa Perkara 2022** |
| **1** | **Pidana Biasa** | **25** | **177** | **202** | **-** | **189** | **13** |
| **2** | **Pidana Singkat** | **-** | **22** | **22** | **-** | **22** | **-** |
| **3** | **Pidana Cepat** | **-** | **29** | **29** | **-** | **29** | **-** |
| **4** | **Lalu lintas** | **-** | **9.887** | **9.887** | **-** | **9.887** | **-** |
| **5** | **Tindak Pidana Korupsi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6** | **Pidana Anak** | **-** | **15** | **15** | **-** | **15** | **15** |
| **7** | **Pidana Praperadilan** | **-** | **2** | **2** | **-** | **2** | **-** |
| **Jumlah** | | **25** | **10.132** | **10.157** | **-** | **10.144** | **28** |

* 1. Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengadilan** | **Jumlah Terdaftar** | **SKUM (Rp)** | **Gugatan** | **Permohonan** | **Bantahan** | **Gugatan Sederhana** | **Total** |
| 1 | PN Wates | 450 | Rp. 127.225.000 | 30 | 397 | - | 23 | 450 |
|  | Jumlah | 450 | Rp. 127.225.000 | 30 | 397 | - | 23 | 450 |

* 1. Perkara Perdata Tingkat Banding

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengadilan / Perkara** | **Sisa 2021** | **Masuk 2022** | **Total Beban 2022** | **Cabut 2022** | **Putus 2022** | **Sisa Perkara 2022** |
| **1** | **Perdata Gugatan** | **1** | **2** | **2** | **-** | **2** | **-** |
| **2** | **Perdata Permohonan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Gugatan Sederhana** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Perlawanan/Derden Verzet** | - | - | - | - | - | - |
| **5** | **PHI** | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **1** | **2** | **2** | **-** | **2** | **-** |

* 1. Perkara Pidana Tingkat Banding

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengadilan / Perkara** | **Sisa 2021** | **Masuk 2022** | **Total Beban 2022** | **Cabut 2022** | **Putus 2022** | **Sisa Perkara 2022** |
| **1** | **Pidana Biasa** | **1** | **10** | **11** | **-** | **9** | **2** |
| **2** | **Pidana Singkat** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Pidana Cepat** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Lalu lintas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **Tindak Pidana Korupsi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6** | **Pidana Anak** | **-** | **1** | **1** |  | **1** | **-** |
| **7** | **Pidana Praperadilan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | | **1** | **11** | **12** |  | **10** | **2** |

* 1. Perkara Perdata Tingkat kasasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengadilan / Perkara** | **Sisa 2021** | **Masuk 2022** | **Total Beban 2022** | **Cabut 2022** | **Putus 2022** | **Sisa Perkara 2022** |
| **1** | **Perdata Gugatan** | **3** | **2** | **5** | **-** | **3** | **2** |
| **2** | **Perdata Permohonan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Gugatan Sederhana** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Perlawanan/Derden Verzet** | - | - | - | - | - | - |
| **5** | **PHI** | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **6** | **3** | **9** | **-** | **-** | **9** |

* 1. Perkara Pidana Tingkat kasasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengadilan / Perkara** | **Sisa 2021** | **Masuk 2022** | **Total Beban 2022** | **Cabut 2022** | **Putus 2022** | **Sisa Perkara 2022** |
| **1** | **Pidana Biasa** | **6** | **3** | **9** | **-** | **-** | **9** |
| **2** | **Pidana Singkat** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Pidana Cepat** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Lalu lintas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **Tindak Pidana Korupsi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6** | **Pidana Anak** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7** | **Pidana Praperadilan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | | **6** | **3** | **9** | **-** | **-** | **9** |

* 1. Perkara Perdata Tingkat Penijauan Kembali

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengadilan / Perkara** | **Sisa 2021** | **Masuk 2022** | **Total Beban 2022** | **Cabut 2022** | **Putus 2022** | **Sisa Perkara 2022** |
| **1** | **Perdata Gugatan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **Perdata Permohonan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Gugatan Sederhana** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Perlawanan/Derden Verzet** | - | - | - | - | - | - |
| **5** | **PHI** | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* 1. Perkara Pidana Tingkat Penijauan Kembali

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pengadilan / Perkara** | **Sisa 2021** | **Masuk 2022** | **Total Beban 2022** | **Cabut 2022** | **Putus 2022** | **Sisa Perkara 2022** |
| **1** | **Pidana Biasa** | **1** | **2** | **3** | **-** | **2** | **1** |
| **2** | **Pidana Singkat** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3** | **Pidana Cepat** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **Lalu lintas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **Tindak Pidana Korupsi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6** | **Pidana Anak** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7** | **Pidana Praperadilan** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | | **1** | **2** | **3** | **-** | **2** | **1** |

**BAB II**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Rapat persiapan kegiatan Studi Banding ke Pengadilan Negeri Wates, dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar beserta tim yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar melalui secara virtual dengan topik bahasan rapat yaitu penetapan outline Laporan Studi Banding ke Pengadilan Negeri Wates.

Gambar 2.1 Foto Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

1. **PELAKSANAAN KEGIATAN STUDI BANDING**

**B.1. Kegiatan Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Negeri Wates dimulai pada tanggal 14 Juli 2023 dengan rundown acara sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Waktu | Tempat / Acara | Petugas / Penanggung Jawab | |
| Kamis, 13 Juli 2023 | | | | |
| 1  2  3 | 13.50 Wita  15.00 WIB  15.00 WIB – 19.00 WIB | Rombongan berangkat ke Jogjakarta melalui Bandara Ngurah Rai Denpasar  Tiba Di Bandara Yogyakarta International Airport  Pengambilan bagasi, Makan Malam dan Menuju Penginapan di Kota Jogjakarta | | Panitia  Panitia  Panitia |
| Jumat, 14 Juli 2023 | | | | |
| 1. | 09.00 WIB - Selesai | Tempat di Ruang Sidang Utama |  | |
| * Pembukaan | MC PN Wates | |
| * Menyanyikan Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung | PN Wates | |
| * Pembacaan Doa | MC | |
| * Salam satker | Pegawai PN Wates | |
| * Sambutan Selamat Datang oleh KPN Wates | KPN Wates | |
| * Sambutan oleh KPT Denpasar | KPT Denpasar | |
| * Pemaparan Profil Satker dan pembangunan Zona Integritas PN Wates | KPN dan Wakil PN Wates, Agen Perubahan | |
| * Sesi Tanya Jawab | MC | |
| * Pertukaran Cindera Mata |  | |
| * Penutup | MC | |
| 2. |  | Peninjauan Lapangan | PN Wates dan Tim | |

**B.2. PELAKSANAAN KOMPONEN PENGUNGKIT**

**B.2.1. MANAJEMEN PERUBAHAN**

**LAPORAN STUDI BANDING**

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**AREA 1**

1. **Kondisi** :

Berikut adalah kondisi tentang pelaksanaan zona integritas di Area I di Pengadilan Negeri Wates :

* + - 1. Kesadaran dan Komitmen Tinggi: Di Area I, terlihat adanya kesadaran yang tinggi dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai terkait penerapan zona integritas. Mereka sepenuhnya menyadari pentingnya mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lingkungan kerja.
      2. Tim Kerja yang Aktif: Area I membentuk tim kerja khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai unit kerja untuk merancang dan mengkoordinasikan implementasi zona integritas. Tim ini berperan penting dalam menyusun rencana aksi, melakukan sosialisasi, dan memantau pelaksanaan zona integritas di seluruh Area I.
      3. Sosialisasi dan Pelatihan Intensif: Area I melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan secara intensif kepada seluruh pegawai. Program ini mencakup pemahaman tentang etika kerja, pencegahan korupsi, peningkatan integritas, dan peningkatan kapasitas kerja. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini, pegawai di Area I memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya zona integritas dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.
      4. Budaya Organisasi yang Kuat: Di Area I, budaya organisasi yang mendukung integritas telah tertanam dengan baik. Pimpinan dan pegawai menghargai nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Mereka secara aktif mendorong dan mendukung pegawai untuk melaporkan pelanggaran etika dan memberikan penghargaan kepada yang berkinerja baik.

Dengan demikian, di Area I terlihat bahwa pelaksanaan zona integritas telah memberikan dampak positif. Kesadaran yang tinggi, tim kerja yang aktif, sosialisasi dan pelatihan intensif, dan budaya organisasi yang mendukung integritas, telah terlihat dalam pelaksanaan zona integritas di Area I pada Pengadilan Negeri Wates. Disamping itu juga, Agen Perubahan telah berperan sangat efektif dalam Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Wates. Agen Perubahan PN Wates memegang peranan penting dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Pengadilan Negeri Wates. Agen Perubahan telah menjalankan perannya sebagai mediator dan katalisator dengan sangat baik, dan menjadi pengingat atau *reminder* setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Wates.

**B.2. PELAKSANAAN KOMPONEN PENGUNGKIT**

**B.2.2. PENATAAN TATA LAKSANA**

**LAPORAN STUDI BANDING**

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**AREA 2**

1. **Kondisi** :

Berikut adalah kondisi tentang pelaksanaan zona integritas di Area II di Pengadilan Negeri Wates :

* + - 1. Pemetaan Proses Kerja: Di Area II, penataan tata laksana dimulai dengan pemetaan dan pemahaman mendalam terhadap proses kerja yang ada. Pegawai di Area II melakukan analisis terhadap alur kerja, prosedur, dan regulasi yang berlaku untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan efisiensi.
      2. Identifikasi Kendala dan Perbaikan: Setelah pemetaan proses kerja, Area II melakukan identifikasi kendala dan hambatan yang mungkin muncul. Mereka melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menghambat kinerja efektif dan efisien. Selanjutnya, dilakukan perbaikan terstruktur dan perubahan dalam sistem kerja untuk meningkatkan tata laksana yang lebih baik.
      3. Penggunaan Teknologi Informasi: Area II memanfaatkan teknologi informasi dalam penataan tata laksana. Mereka mengadopsi sistem elektronik dan perangkat lunak yang relevan untuk mengotomatiskan dan mempercepat proses kerja. Hal ini membantu dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi.
      4. Standarisasi Prosedur: Area II menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk setiap aspek tata laksana. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam pelaksanaan tugas. Standarisasi ini juga membantu dalam memudahkan pelacakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tata laksana yang sesuai.
      5. Koordinasi Antar Unit Kerja: Penataan tata laksana di Area II melibatkan koordinasi yang baik antar unit kerja. Mereka mengadakan pertemuan rutin, berbagi informasi, dan melakukan sinkronisasi kegiatan. Koordinasi yang baik meminimalisir tumpang tindih kerja, meningkatkan kolaborasi, dan memperkuat sinergi antara unit kerja.
      6. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Area II melakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap penataan tata laksana yang telah dilakukan. Mereka menetapkan indikator kinerja dan melakukan pemantauan terhadap implementasi tata laksana. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan.
      7. Penyampaian Informasi yang Efektif: Area II memastikan penyampaian informasi yang efektif dan tepat waktu kepada seluruh pihak terkait. Mereka menggunakan media komunikasi yang sesuai, baik itu melalui rapat, surat elektronik, atau portal informasi internal. Hal ini membantu dalam menjaga kelancaran komunikasi dan pemahaman yang sama mengenai tata laksana yang diterapkan.

Dengan demikian, di Area II terlihat bahwa pelaksanaan penataan tata laksana telah memberikan dampak positif. Pemetaan proses kerja, identifikasi kendala dan perbaikan, penggunaan teknologi informasi, standarisasi prosedur, koordinasi antar unit kerja, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan, serta penyampaian informasi yang efektif telah terlihat dalam pelaksanaan penataan tata laksana di Area II, dimana Pengadilan Negeri Wates telah mengadakan Rapat Penilaian Kinerja dan Baperjakat, Monev Mutasi Pegawai, Pembinaan Perma 7,8,9 Tahun 2016 dan Maklumat Nomor 1 Tahun 2017 secara rutin, serta Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi.

**B.2. PELAKSANAAN KOMPONEN PENGUNGKIT**

**B.2.3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

**LAPORAN STUDI BANDING**

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**AREA 3**

1. **Kondisi** :

Berikut adalah kondisi tentang pelaksanaan zona integritas di Area III di Pengadilan Negeri Wates :

1. Identifikasi Kebutuhan SDM: Di Area III, penataan manajemen SDM dimulai dengan identifikasi kebutuhan SDM yang dibutuhkan. Hal ini melibatkan penilaian terhadap jumlah, kualifikasi, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi. Identifikasi kebutuhan SDM ini menjadi dasar untuk pengembangan strategi pengelolaan SDM yang efektif.

2. Pengembangan Kompetensi: Area III melaksanakan program pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan pegawai. Mereka menawarkan pelatihan, workshop, atau program pembelajaran lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pegawai. Pengembangan kompetensi ini membantu pegawai untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

3. Penilaian Kinerja: Area III melaksanakan penilaian kinerja pegawai secara teratur. Proses penilaian kinerja ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pegawai, memberikan umpan balik konstruktif, dan mengidentifikasi area pengembangan selanjutnya. Hasil penilaian kinerja juga digunakan untuk pengambilan keputusan terkait penghargaan, promosi, atau pengembangan karir.

4. Pengembangan Kepemimpinan: Area III memberikan perhatian khusus pada pengembangan kepemimpinan. Mereka mengidentifikasi dan melibatkan calon pemimpin potensial dalam program pengembangan kepemimpinan. Melalui pelatihan, mentoring, atau program pengembangan lainnya, mereka mempersiapkan pegawai untuk peran kepemimpinan di masa depan.

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Area III melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi penataan manajemen SDM. Mereka menggunakan indikator kinerja dan data terkait SDM untuk memastikan efektivitas strategi dan kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan SDM.

6. Budaya Organisasi yang Mendorong Pertumbuhan: Area III mendorong budaya organisasi yang mendorong pertumbuhan dan pembelajaran. Mereka menciptakan lingkungan di mana pegawai didorong untuk berinovasi, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Budaya ini membantu dalam menciptakan pegawai yang berkompeten, termotivasi, dan siap menghadapi perubahan.

Dengan demikian, di Area III terlihat bahwa pelaksanaan penataan manajemen SDM telah memberikan dampak positif. Identifikasi kebutuhan SDM, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan kepemimpinan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta budaya organisasi yang mendorong pertumbuhan telah terlihat dalam pelaksanaan penataan manajemen SDM di Area III, dimana Pengadilan Negeri Wates telah menerapkan system Reward and Punishment, penggunaan aplikasi SIKEP, pemasangan banner-banner mengenai budaya malu dan kode etik hakim dan pegawai.

**B.2. PELAKSANAAN KOMPONEN PENGUNGKIT**

**B.2.4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**

**LAPORAN STUDI BANDING**

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**AREA 4**

1. **Kondisi** :

Berikut adalah kondisi tentang pelaksanaan zona integritas di Area IV di Pengadilan Negeri Wates :

1. Pemantauan dan Evaluasi Rutin: Di Area IV, penguatan akuntabilitas dimulai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja dan pencapaian target. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan di Area IV sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan, keberhasilan, dan peluang perbaikan.

2. Transparansi dan Akses Informasi: Area IV menerapkan kebijakan transparansi dan memberikan akses yang mudah terhadap informasi yang relevan. Mereka memastikan bahwa pegawai dan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap informasi tentang kebijakan, prosedur, dan kinerja organisasi. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pelaporan dan Pengungkapan: Area IV menerapkan sistem pelaporan dan pengungkapan yang jelas dan terstruktur. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan dan penggunaan sumber daya di Area IV dilaporkan dengan akurat dan transparan. Pelaporan ini mencakup laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan lain yang relevan.

4. Penyampaian Hasil dan Pertanggungjawaban: Area IV menyampaikan hasil kinerja dan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan secara berkala. Mereka menerbitkan laporan kinerja, menyelenggarakan pertemuan pemangku kepentingan, dan berkomunikasi secara terbuka tentang pencapaian, tantangan, dan langkah-langkah perbaikan yang diambil. Penyampaian hasil dan pertanggungjawaban ini memperkuat transparansi dan tanggung jawab di Area IV.

Dengan demikian, di Area IV terlihat bahwa pelaksanaan penguatan akuntabilitas telah memberikan dampak positif. Pemantauan dan evaluasi rutin, transparansi dan akses informasi, pelaporan dan pengungkapan, serta penyampaian hasil dan pertanggungjawaban telah terlihat dalam pelaksanaan penguatan akuntabilitas di Area IV, dibuktikan dengan Pengadilan Negeri Wates telah mendapatkan berbagai penghargaan seperti Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik, Penerapan Terbaik Akreditasi Penjaminan Mutu, Penghargaan Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Penghargaan di bidang keuangan dan anggaran.

**B.2. PELAKSANAAN KOMPONEN PENGUNGKIT**

**B.2.5. PENGUATAN PENGAWASAN**

**LAPORAN STUDI BANDING**

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**AREA 5**

1. **Kondisi** :

Berikut adalah kondisi tentang pelaksanaan zona integritas di Area V di Pengadilan Negeri Wates :

1. Peningkatan Kelembagaan Pengawasan: Di Area V, penguatan pengawasan dimulai dengan meningkatkan kelembagaan pengawasan yang ada. Area V mungkin membentuk unit yang bertanggung jawab untuk pengawasan internal dan eksternal. Kelembagaan ini dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

2. Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan: Area V menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengawasan. Mereka mengatur mekanisme pengawasan yang terstruktur dan sistematis, termasuk penugasan, pemantauan, pengumpulan bukti, dan pelaporan. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara konsisten dan efektif di seluruh Area V.

3. Audit dan Pemeriksaan Internal: Area V melaksanakan audit dan pemeriksaan internal secara rutin untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau pelanggaran. Audit dan pemeriksaan ini dilakukan oleh tim yang independen dan profesional, dengan fokus pada efisiensi, kepatuhan, dan tata kelola yang baik. Temuan dan rekomendasi dari audit dan pemeriksaan internal digunakan untuk perbaikan dan tindakan perbaikan.

4. Sistem Pelaporan Whistleblowing: Area V memfasilitasi pelaporan whistleblowing yang aman dan terjamin. Mereka mendirikan sistem yang memungkinkan pegawai atau pihak eksternal melaporkan potensi pelanggaran, penyelewengan, atau praktik tidak etis tanpa rasa takut atau risiko balasan. Sistem ini memberikan saluran komunikasi yang penting dalam pengawasan dan pencegahan tindakan yang melanggar integritas.

5. Penguatan Kualitas dan Kapasitas Pengawas: Area V memberikan perhatian khusus pada penguatan kualitas dan kapasitas pengawas. Mereka melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan etika pengawas. Penguatan kualitas dan kapasitas pengawas ini membantu dalam menjalankan tugas pengawasan dengan profesionalisme dan integritas.

6. Tindak Lanjut Terhadap Temuan: Area V melakukan tindak lanjut yang tegas terhadap temuan pengawasan. Mereka mengimplementasikan rekomendasi dan memastikan bahwa tindakan perbaikan diambil secara tepat waktu. Tindak lanjut ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi.

Dengan demikian, di Area V terlihat bahwa pelaksanaan penguatan pengawasan telah memberikan dampak positif. Peningkatan kelembagaan pengawasan, penetapan kebijakan dan prosedur pengawasan, audit dan pemeriksaan internal, sistem pelaporan whistleblowing, penguatan kualitas dan kapasitas pengawas, serta tindak lanjut terhadap temuan telah terlihat dalam pelaksanaan penguatan pengawasan di Area V. Pengadilan Negeri Wates juga telah menerima predikat SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

**B.2. PELAKSANAAN KOMPONEN PENGUNGKIT**

**B.2.6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**LAPORAN STUDI BANDING**

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

**AREA 6**

1. **Kondisi** :

Berikut adalah kondisi tentang pelaksanaan zona integritas di Area VI di Pengadilan Negeri Wates :

* + - 1. Analisis Kebutuhan Masyarakat: Di Area VI, peningkatan kualitas pelayanan publik dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Area VI melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi kebutuhan, aspirasi, dan harapan terkait pelayanan publik. Analisis ini membantu Area VI untuk memahami secara lebih mendalam kebutuhan masyarakat dan menyusun rencana aksi yang sesuai.
      2. Sistem Informasi Pelayanan: Area VI mengembangkan sistem informasi pelayanan yang efisien dan terintegrasi. Mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan informasi yang jelas, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi, mengajukan permohonan, atau memberikan umpan balik secara online, sehingga meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan pelayanan.
      3. Pemangku Kepentingan yang Terlibat: Area VI melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk masyarakat, dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik. Mereka mengadakan dialog, konsultasi, atau pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik.
      4. Peningkatan Proses Pelayanan: Area VI melakukan perbaikan pada proses pelayanan guna meningkatkan efisiensi dan kualitasnya. Mereka mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan administratif, menyederhanakan prosedur, dan mempercepat waktu respon terhadap permintaan masyarakat. Peningkatan proses pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan ramah terhadap kebutuhan masyarakat.
      5. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai: Area VI memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pelatihan ini mencakup keterampilan komunikasi, keramahan, penyelesaian masalah, dan penguasaan teknologi informasi yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Peningkatan kualitas pegawai membantu dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
      6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan: Area VI melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan secara teratur. Mereka menggunakan indikator kinerja, umpan balik masyarakat, atau mekanisme pengukuran lainnya untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan. Monitoring dan evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki kekurangan dalam pelayanan.
      7. Inovasi dan Kolaborasi: Area VI mendorong inovasi dalam penyediaan pelayanan publik. Mereka menciptakan lingkungan yang mendorong pegawai untuk mencari solusi kreatif dan memperbaiki proses pelayanan. Selain itu, Area VI juga menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal, untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui sinergi dan pertukaran pengalaman.

Dengan demikian, di Area VI terlihat bahwa pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik telah memberikan dampak positif. Analisis kebutuhan masyarakat, sistem informasi pelayanan, keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan proses pelayanan, pelatihan dan pengembangan pegawai, monitoring dan evaluasi pelayanan, serta inovasi dan kolaborasi telah terlihat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di Area VI, namun ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan seperti pemasangan guiding block bagi penyandang disablitas yang tidak menyeluruh di area pelayanan seperti PTSP dan ruang sidang, serta tidak ada ruang sidang inklusif secara khusus tetapi digabungkan di ruang siding pidana.

**B.3. CAPAIAN KOMPONEN HASIL**

**LAPORAN STUDI BANDING**

**PENGADILAN NEGERI NEGARA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS :**

**CAPAIAN KOMPONEN HASIL**

1. **Kondisi** :

Pelaksanaan Survey IPAK dan IKM pada Pengadilan Negeri Wates telah menggunakan aplikasi SISUPER Badilum. Masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan langsung diarahkan untuk mengisi survey IKM dan IPAK. Untuk Pengelolaan SAKIP sendiri telah dilakukan dengan baik dan berjenjang dan telah melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga target-terget yang telah ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi

1. **Kriteria** :

- Nilai Survey IPAK mencapai 3,99 dan berpredikat bersih dari korupsi,

- Nili Survey IKM mencapai 3,97 dan berpredikat sangat baik

- Pengelolaan Kinerja (SAKIP) bernilai 100% dan lebih baik dari tahun sebelumnya

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

**Pengadilan Negeri Wates telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dengan sangat baik, dimana setiap Area telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana aksinya masing-masing yaitu:**

* + - 1. **Area I**

**Pembangunan Zona Integritgas Pada Area I telah dilaksanakan dengan baik, seperti terlihat dari Kesadaran yang tinggi, tim kerja yang aktif, sosialisasi dan pelatihan intensif, dan budaya organisasi yang mendukung integritas. Agen Perubahan telah menjalankan perannya sebagai mediator dan katalisator dengan sangat baik, dan menjadi pengingat atau reminder setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Wates**

* + - 1. **Area II**

**Pembangunan Zona Integritgas Pada Area II telah dilaksanakan dengan baik, seperti terlihat dari Pemetaan proses kerja, identifikasi kendala dan perbaikan, penggunaan teknologi informasi, standarisasi prosedur, koordinasi antar unit kerja, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan, serta penyampaian informasi yang efektif, dimana Pengadilan Negeri Wates telah mengadakan Rapat Penilaian Kinerja dan Baperjakat, Monev Mutasi Pegawai, Pembinaan Perma 7,8,9 Tahun 2016 dan Maklumat Nomor 1 Tahun 2017 secara rutin, serta Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi.**

* + - 1. **Area III**

**Pembangunan Zona Integritgas Pada Area III telah dilaksanakan dengan baik, seperti terlihat dari Identifikasi kebutuhan SDM, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan kepemimpinan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta budaya organisasi yang mendorong pertumbuhan dimana Pengadilan Negeri Wates telah menerapkan system Reward and Punishment, penggunaan aplikasi SIKEP, pemasangan banner-banner mengenai budaya malu dan kode etik hakim dan pegawai.**

* + - 1. **Area IV**

**Pembangunan Zona Integritgas Pada Area IV telah dilaksanakan dengan baik, seperti terlihat dari Pemantauan dan evaluasi rutin, transparansi dan akses informasi, pelaporan dan pengungkapan, serta penyampaian hasil dan pertanggungjawaban dimana Pengadilan Negeri Wates telah mendapatkan berbagai penghargaan seperti Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik, Penerapan Terbaik Akreditasi Penjaminan Mutu, Penghargaan Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Penghargaan di bidang keuangan dan anggaran.**

* + - 1. **Area V**

**Pembangunan Zona Integritgas Pada Area V telah dilaksanakan dengan baik, seperti terlihat Peningkatan kelembagaan pengawasan, penetapan kebijakan dan prosedur pengawasan, audit dan pemeriksaan internal, sistem pelaporan whistleblowing, penguatan kualitas dan kapasitas pengawas, serta tindak lanjut terhadap temuan dimana Pengadilan Negeri Wates telah mendapatkan telah menerima predikat SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).**

* + - 1. **Area VI**

**Pembangunan Zona Integritgas Pada Area VI telah dilaksanakan dengan baik, seperti terlihat . Analisis kebutuhan masyarakat, sistem informasi pelayanan, keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan proses pelayanan, pelatihan dan pengembangan pegawai, monitoring dan evaluasi pelayanan, serta inovasi dan kolaborasi telah terlihat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik namun ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan seperti pemasangan guiding block bagi penyandang disablitas yang tidak menyeluruh di area pelayanan seperti PTSP dan ruang sidang, serta tidak ada ruang sidang inklusif secara khusus tetapi digabungkan di ruang siding pidana.**

1. **REKOMENDASI**

**Beberapa inovasi Pengadilan Negeri Wates dapat diterapkan pada Pengadilan Negeri Negara, untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik serta meningkatkan integritas aparat Pengadilan Negeri Negara diantaranya, Loket Disabilitas, Kantin Kejujuran, dan Anjungan Mandiri dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di PN Negaraq**

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding ke Pengadilan Wates ini dibuat, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga output dari perjalanan dinas. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dipergunakan sebagai referensi dan bahan evaluasi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan jajarannya dalam meningkatkan kinerja Pembangunan Zona Integritas.

Denpasar, 18 Juli 2023

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Pengadilan Negeri Negara | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

LAMPIRAN 1

SK TIM STUDI BANDING

LAMPIRAN 2